

Judul : Langkah Nyata Wujudkan Polisi yang Dicintai Rakyat
Tanggal : Selasa, 23 September 2025
Surat Kabar : Rakyat Merdeka
Halaman : 3

Pembentukan Tim Reformasi Polri

Langkah Nyata Wujudkan Polisi Yang Dicintai Rakyat

Komisi III DPR mendukung kebijakan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo membentuk Tim Transformasi Reformasi Polri. Pembentukan Tim ini dinilai sebagai langkah nyata dalam merespons tuntutan masyarakat untuk perubahan dalam tubuh Polri.

ANGGOTA Komisi III DPR Rudianto Lallo mengatakan, Jenderal Listyo Sigit Prabowo tengah berupaya mewujudkan institusi kepolisian yang dicintai rakyat. "Kami memberi apresiasi terhadap Kapolri yang cepat membentuk tim reformasi Polri dan sinergi dengan arahan Bapak Presiden. Tentunya dengan tujuan membawa Polri menjadi lebih baik lagi," terangnya di Jakarta, Senin (22/9/2025).

Rudianto menyambut baik pembentukan tim tersebut. Dia menyebut kebijakan Kapolri ini sebagai langkah konstitusional yang tepat dalam menjawab aspirasi masyarakat akan kepolisian yang lebih bersih, profesional, dan bebas dari praktik-praktik yang merugikan publik.

Apalagi konstitusi Republik Indonesia dengan jelas memberi tugas utama kepada Polri untuk

menjaga keamanan, ketertiban umum, melindungi hak asasi manusia, serta menegakkan hukum secara adil dan merata. Fungsi-fungsi yang memerlukan adaptasi dan pembaruan agar selalu relevan dengan dinamika sosial dan tantangan zaman.

"Sebab fungsi Polri tidak hanya soal penindakan, tetapi juga pencegahan, pelayanan masyarakat, dan perlindungan HAM," ucap politisi Fraksi Nasdem ini.

Rudianto Lallo berharap, Tim Transformasi Reformasi Polri segera melakukan proses evaluasi internal, peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM), penguatan sistem pengawasan, dan penggunaan teknologi modern. Polri harus mampu responsif terhadap kritik serta saran publik tanpa mengabaikan unsur kepastian hukum dan perlindungan konstitusional.



Rudianto Lallo

"Perilaku aparat harus selalu mengacu pada asas-asas keadilan dan kepastian hukum. Transformasi yang dijanjikan tim ini harus meliputi sikap dan budaya organisasi, termasuk kebiasaan administrasi yang transparan, prosedur operasional yang jelas, dan mekanisme penanganan keluhan masyarakat yang dapat diakses oleh siapa

saja," jelasnya.

Tanpa itu, kata Rudianto Lallo, reformasi bisa berhenti di tataran wacana. Namun demikian, dia optimistis, reformasi ini akan mampu menjawab tuntutan masyarakat. Toh Polri sendiri menyatakan bahwa tim akan bekerja secara menyeluruh, melibatkan wilayah dan satuan kerja untuk merancang dan

melaksanakan reformasi yang mendasar dan luas.

"Kami berharap dengan sinergi antara Polri, Komisi III DPR, masyarakat sipil, dan pihak-pihak lain, kepercayaan publik terhadap institusi kepolisian dapat terus meningkat," pungkasnya.

Sebelumnya, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo telah menerbitkan surat perintah pembentukan Tim Transformasi Reformasi Polri sebagai langkah nyata merespons tuntutan perubahan dalam tubuh Polri. Keputusan ini diambil dalam rangka meningkatkan tanggung jawab, transparansi, dan akuntabilitas, sekaligus memperkuat kerja sama antara institusi kepolisian, pemerintah dan pemangku kepentingan.

Menurut Karo Penmas Divisi Humas Polri, Trunoyudo Wisnu Andiko, tim ini bukan sekadar simbol perubahan, melainkan sarana operasional untuk mewujudkan visi strategis "Grand Strategy Polri 2025-2045" melalui reformasi yang sistematis dan melibatkan semua satuan kerja dan wilayah. ■ KAL